

Cuaca Ekstrem Berpotensi Landa Yogyakarta

YOGYAKARTA (IM)-

Stasiun Meteorologi Yogyakarta meminta masyarakat di DIY mewaspadaai kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem hingga tiga hari ke depan, 16-18 Februari 2023. Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta, Warjono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/2) mengatakan berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer terkini, gelombang atmosfer Rossby aktif di wilayah Jawa bagian barat.

Gelombang atmosfer ini, jelasnya berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah sekitarnya. "Indeks Osilasi Selatan atau SOI bernilai +13.3 yang menunjukkan terdapat suplai uap air bergerak dari Pasifik Timur ke Pasifik Barat, dengan nilai Indeks ENSO di NINO 3.4 sebesar -0.50 sehingga signifikan terhadap peningkatan hujan di wilayah Indonesia," katanya.

Kondisi tersebut, ujarnya, juga didukung dengan adanya sirkulasi Siklonik di selatan Jawa yang membentuk belokan angin dan konvergensi (pertemuan massa udara) di wilayah Sumsel, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT sehingga memicu peningkatan potensi pertumbuhan awan hujan

di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Profil vertikal kelembapan udara yang relatif cukup tinggi mencapai di atas 70 % dan labilitas lokal pada siang hari yang cukup kuat turut berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah DIY.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, lanjutnya, BMKG DIY memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang untuk 16-18 Februari 2023 dapat terjadi di wilayah DIY.

Diprakirakan pula, gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta pada kisaran 2,5 hingga 4,0 meter atau kategori tinggi. "BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang dan puting beliung, terutama untuk masyarakat yang berada dan tinggal di wilayah rawan bencana hidrometeorologi," katanya. ● pra

Ridwan Kamil Beri Perhatian Distorsi Informasi Pemilu 2024 di Jabar

BANDUNG (IM)-

Distorsi informasi saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bakal menjadi atensi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berharap, media massa bias menjadi sumber referensi terpercaya bagi masyarakat di tengah arus peredaran berita hoaks.

"Dari pengalaman 2014 sampai 2019 secara umum sangat kondusif, hanya yang meningkat adalah distorsi informasi yang menjadi sumber hoaks, sumbernya juga mengatakan 60 persen dipercaya," kata Emil usai "Ngariung Bareng Kapolda Jabar" di Mapolda Jabar, Rabu (15/2).

Emil meminta, media menyangkal segala jenis informasi sehingga dapat menjadi satu-satunya harapan informasi yang valid dan terpercaya bagi masyarakat. Sementara bagi masyarakat, Emil meminta, agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum tentu

kebenaran. Dengan begitu, diharapkan demokrasi dalam gelaran Pemilu 2024 dapat berjalan dengan kondusif di Jawa Barat.

"Jabar dengan provinsi yang pencoblosan yang paling banyak 35 juta dan tingkat keahadirannya hampir 80 persen menjadi contoh masyarakat demokrasi yang paling ideal," ujar Emil.

Sementara itu, Kapolda Jabar, Irfan Siantana mengatakan bahwa pihak kepolisian dan instansi lainnya melakukan kajian dan mencari pola-pola guna mencegah kerawanan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Polda Jabar bersama instansi terkait soliditas yang ada sudah menginventarisir berbagai kerawanan yang ada di tiap tahapan dan kami mencari pola dan langkah untuk mencegah kerawanan itu berkembang menjadi gangguan Kamtibmas," pungkask dia. ● pra

8 | Nusantara



PENYALURAN BANTUAN VITAMIN C

Kepala Staf Kepresidenan Jendral TNI Purn Moeldoko mengikuti penyuntikan Vitamin C saat menyalurkan bantuan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (15/2). Kantor Staf Kepresidenan menyalurkan sebanyak 2,5 juta ampul vitamin C hasil bantuan dari pengusaha sektor kesehatan untuk disuntikan kepada masyarakat sebagai penguat imunitas di masa peralihan pandemi menjadi endemi.

Bawaslu Kabupaten Bogor Kekurangan Mebel dan Pegawai

Kami sudah menyiapkan hibah anggaran untuk pengadaan mebel sebesar hampir Rp 1,9 miliar. Namun, ternyata ada aturan yang melarang hibah anggaran atau uang hingga Pemkab Bogor merasa kurang leluasa, kata Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

CIBINONG (IM)- Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan sedang mengkaji minimnya mebel dan pegawai Badan Pengawasan Pemilu atau Ba-

waslu Kabupaten Bogor. Saat ini, Iwan menyebutkan Pemkab Bogor sudah menanggarkan hibah uang untuk Bawaslu Kabupaten

Bogor untuk mebel dan pegawai kantor Bawaslu. Namun, ternyata ada aturan yang melarang hibah dalam bentuk anggaran dan hanya diperbolehkan dalam bentuk barang.

"Kami sudah menyiapkan hibah anggaran untuk pengadaan mebel sebesar hampir Rp 1,9 miliar. Namun, ternyata ada aturan yang melarang hibah anggaran atau uang hingga Pemkab Bogor merasa kurang leluasa," kata Iwan kepada wartawan, Rabu (15/2).

Dia menerangkan, ka-

lau memang nanti tidak bisa hibah berupa uang maka jajarannya akan menghibahkan dalam bentuk barang berupa mebel bekas.

"Kami juga tak ingin ada temuan, sambil itu kami bisa saja menghibahkan mebel bekas hingga Bawaslu Kabupaten Bogor tidak kekurangan mebel," terangnya.

Dia menjelaskan, mengenai kekurangan pegawai itu jajarannya akan memperjelaskan orang untuk menjadi pekerja di kantor Bawaslu Kabupaten Bogor.

"Nantinya, gaji pegawai

tersebut akan dibayarkan Pemkab Bogor," jelas Iwan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irfan Firmansyah berharap ada jalan tengah terkait kebutuhan mebel dan minimnya jumlah pegawai.

Sedangkan, anggaran pengadaan mebel sebesar Rp1,9 miliar itu, pos anggarannya di Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor. "Harapan kami ada jalan tengah dan kebijakan baik dari Bawaslu RI maupun Pemkab Bogor, hingga kebutuhan mebel kami bisa diwujudkan," harap Irfan. ● gio

Dugaan Kasus Gratifikasi Anggota DPRD, Bupati Purwakarta Penuhi Undangan Kejari

KARAWANG (IM)- Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Anne Ratna Mustika memenuhi undangan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, Rabu (15/2).

Kedatangan Bupati Anne Ratna Mustika berkaitan dengan Rapat Paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) dan adanya dugaan gratifikasi terhadap 24 DPRD Purwakarta oleh pihak tertentu.

Anne mengatakan kehadirannya di Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk memberikan klarifikasi dugaan gratifikasi 24 Anggota DPRD Purwakarta dan tahapan Rapat Paripurna Raperda PPA 2021. "Saya tadi ada 20 pertanyaan terkait Rapat Paripurna Raperda

PPA," kata Anne. Ditambahkan Anne, soal pertanyaan penyidik tidak ada yang mengancam soal dugaan gratifikasi dari siapa dan diberikan ke siapa. "Hanya seputar tahapan dan kehadiran saya di Rapat Paripurna Raperda PPA yang kita usulkan dan diserahkan sesuai aturan ke DPRD Purwakarta," ungkapnya. Mengomentari

pernyataan Ketua DPRD Purwakarta bahwa paripurna itu fiktif, Anne mengatakan selaku eksekutif pihaknya hanyalah menjadi pihak yang diundang, bukan pelaksanaan.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Purwakarta telah mengundang belasan anggota DPRD Purwakarta, empat pimpinan DPRD dan Sekre-

taris Dewan untuk diklarifikasi berkaitan dengan laporan dan pengaduan dugaan gratifikasi kepada sejumlah anggota dewan dalam konteks boikot paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) TA 2021 pada medio September 2022 lalu. ● pra



PAMERAN IKM BALI BANGKIT TAHAP 1

Pekerja melayani wisatawan mancanegara yang memilih produk kerajinan saat Pameran IKM Bali Bangkit Tahap 1 di Taman Budaya Bali, Denpasar, Bali, Rabu (15/2). Kegiatan yang digelar 15 Februari hingga 7 Maret 2023 tersebut diikuti 120 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan menerapkan penjualan secara daring maupun luring untuk mempromosikan kerajinan tangan yang diproduksi dalam upaya membangkitkan perekonomian Bali.

Yana Mulyana: Persoalan Sampah Harus Diselesaikan Semua Pihak

BANDUNG (IM)-

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, permasalahan sampah masih menjadi persoalan klasik yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Menurut Yana Mulyana, permasalahan sampah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Melainkan semua pihak, khususnya masyarakat yang harus ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan sampah.

"Persoalan sampah ini kan masalah klasik, yang harus diselesaikan serius oleh semua. Tidak bisa hanya pemerintah saja. Kita juga minta perilaku masyarakat. Tidak bisa dilakukan sendiri," kata Yana Mulyana, Rabu (15/2).

Yana menyebut, dalam penanganan sampah di Kota Bandung hanya diperlukan perilaku masyarakat. Hematnya, masyarakat terlebih da-

hulu memilah-milah sampah sebelum berakhir di TPS.

"Kalau dari kita, pembersihan dan sedimentasi sampah terus kita lakukan. Persoalan beberapa waktu lalu itu kan karena TPA Sarimukti ada kendala. Makanya persoalan sampah ini harus dimulai dari masyarakat. Seperti program Kang Pisman. Itu efektif," ucapnya.

Teknologi incinerator dinilai saat ini paling efektif dalam mengurangi timbunan limbah. Namun dalam perjalanannya, teknologi tersebut mendapat banyak pertentangan dari sejumlah pihak.

"Metode penyelesaian cepat pasti incinerator. Tetapi ada anggapan tidak ramah polusi. Tetapi saya menilai teknologi ini kan sudah ada rekomendasi dari kementerian lingkungan hidup. Kita sudah berjalan di tingkat RW, dan itu lumayan selesai masalah," ujar dia. ● pra

Sekda: Waspada 22 Kecamatan di Garut Berpotensi Banjir pada Februari 2023

GARUT (IM)- Sekda Kabupaten Garut, Nurdin Yana mengatakan, dari total 43 kecamatan di wilayah Kabupaten Garut, ada sebanyak 22 kecamatan yang memiliki tingkat potensi menengah terjadinya bencana banjir selama Februari 2023.

Ke-22 kecamatan di Garut tersebut yakni Kecamatan Banjarwangi, Bayongbong, Caringin, Cibalong, Cibatu, Cikajang, Cikelet, Gilawu, Cisompet, Cisarupan, Garut Kota, Karangpawitan, Karangtengah, Malimbong, Pakenjeng, Pameungpeuk, Pasirwangi, Samarang, Selawu, Singajaya, Sukaresmi, dan Kecamatan Sukawening.

Untuk itu, dia menyebutkan Pemkab Garut pun mengeluarkan imbauan peringatan dini dan langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana banjir dan tanah longsor selama Februari 2023 tersebut.

Imbauan dituangkan melalui surat bernomor BC.03.01/570/BPBD tanggal 9 Februari 2023

ditandatangani Sekretaris Daerah Garut Nurdin Yana, sebagaimana dirilis Dinas Komunikasi dan Informatika Garut, Selasa (14/2) kemarin.

Dalam surat merupakan tindak lanjut Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 0340/PB.01.03.02/PK tanggal 8 Februari 2023 perihal yang sama itu disebutkan, prakiraan daerah potensi bencana banjir selama Februari 2023 sendiri dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPUPR) dan Perumahan Rakyat dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Atas kondisi tersebut diperlukan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan guna meminimalisir dampak ancaman banjir dan gerakan tanah (longsor) yang mungkin timbul. Karenanya, dalam suratnya, Nurdin Yana mengimbau para camat agar tetap waspada dan meningkatkan kesiap-

siagaan menghadapi potensi ancaman banjir dan tanah longsor di wilayah Garut.

Nurdin mengharuskan para camat melakukan 11 langkah antisipatif. Antara lain melakukan monitoring untuk mendapatkan update informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana melalui website BMKG ataupun yang lainnya.

Lalu, menyiapkan tempat evakuasi akhir/hunian sementara apabila terjadi bencana mengaktifkan adanya pengungsi sesuai protokol kesehatan Covid-19, serta mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya (sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan sebagainya) yang ada di wilayah kecamatan masing-masing dalam rangka kesiapsiagaan.

Disebutkan pula, berkoordinasi penanganan darurat bencana, dapat menghubungi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Kabupaten Garut 0852-2061-1117. ● pra

Forkopimda Kota Bogor Sidak Minyak Kita dan Sembako

BOGOR (IM)- Forkopimda Kota Bogor melakukan pengecekan ke distributor minyak goreng dan pasar perihwal ketersediaan Minyak Kita serta stok sembako pada Rabu (15/2).

Lokasi pertama menjadi sasaran rombongan Forkopimda Kota Bogor itu mengecek ke distributor Minyak Kita dan sembako di wilayah Tanah Sareal. Lokasi kedua yakni Pasar Bogor.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Polisi Bismo Teguh Prakoso sebagai unsur Forkopimda Kota Bogor mengatakan, hasilnya stok Minyak Kita dan sembako sejauh ini masih relatif aman.

Bismo memaparkan, Forkopimda Kota Bogor melakukan pengecekan persediaan Minyak Kita dan sembako berupa beras dan cabai. Di lapangan didapati persediaan minyak curah mencukupi di wilayah Kota Bogor.

"Kami sampaikan siang atau sore hari ini akan datang lagi stok minyak kita, untuk ketersediaan minyak premium juga mencukupi. Harga sembako, tempe, tahu dan kedelai masih normal, tetapi harga cabai ada peningkatan harga," kata Bismo.

"Setelah kami informasikan bahwa sore ini akan datang stok minyak pedagang dan distributor diberikan imbauan agar tidak menimbun. Sejak ini masih belum dapat informasi penimbunan dan lainnya. Jadi siapa yang menimbun, mengemas ulang Minyak Kita, tentu akan kami lakukan pendindakan," tambah Bismo.

Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor, Bima Arya menuturkan minyak kita sebetulnya stok aman, tapi karena diminati masyarakat, stoknya menipis.

Menteri Perdagangan (Mendag) menginformasikan, saat ini sedang produksi minyak kita lebih banyak dan akan membanjiri pasar dalam



BIMA ARYA
Wali Kota Bogor

waktu dekat.

"Ya, sedang produksi, nanti sebentar lagi membanjiri pasar. Jadi jangan khawatir. Kami cek juga sembako di Pasar Bogor tadi, relatif masih terkendali harga-harga sembako," tutur Bima.

Bima membeberkan, untuk komoditas cabai mengalami sedikit kenaikan, faktornya karena cuaca hujan. Sehingga stok yang dihasilkan lebih sedikit, ini yang diduga penyebab kenaikan harga cabai.

"Keren harga cabai naik, kami mendorong agar masyarakat menggeliatkan kembali urban farming. Untuk harga sembako lain-lain masih relatif aman. Kami dorong percepatan suplai minyak kita. Kemarin ada yang bundling, tapi tadi dilaporkan tidak di bundling," pungkasknya.

Sementara itu, Kepala Unit Pasar Bogor, Hardian Rahman mengatakan, pasokan sembako di Pasar Bogor masih aman, meski begitu komoditas cabai mengalami sedikit kenaikan. Akan tetapi untuk stok masih aman.

"Harga cabai sekarang cabai merah teropong Rp70 ribu, cabai hijau Rp24 ribu, cabai merah keriting Rp45 ribu, cabai rawit merah Rp70 ribu dan cabai rawit hijau Rp45 ribu. Untuk stok sembako masih aman," terangnya. ● gio



BELAJAR TOLERANSI BERAGAMA

Siswa SD Yos Sudarso mengikuti kegiatan belajar mengajar saat mengunjungi Kelenteng Hok Tek Bio di Kampung Kerukunan, Lebak, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (15/2). Sebanyak 72 siswa mengikuti pembelajaran dalam proyek pancasila kurikulum merdeka untuk menanamkan toleransi antara umat beragama sejak dini, dengan mengunjungi tempat beribadah yang letaknya berdampingan.